

# **RENSTRA**

## **KBRI YANGON PERIODE 2015 - 2019**



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
YANGON  
2015**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I      KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOT PERWAKILAN RI.....</b>	<b>1</b>
I.1    Kondisi Umum.....	1
I.2    Analisis SWOT.....	5
<b>BAB II     VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN RI.....</b>	<b>10</b>
II.1   Visi Perwakilan RI.....	10
II.2   Misi Perwakilan RI.....	10
II.3   Tujuan Perwakilan RI.....	11
II.4   Sasaran Strategis Perwakilan RI.....	12
<b>PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran I    : Matriks Arah Kebijakan dan Strategi	
Lampiran II   : Matriks Target Kinerja	
Lampiran III  : Perhitungan Indeks Peran KBRI Yangon	



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
YANGON**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK REPUBLIK UNI MYANMAR  
NOMOR: 196 /KPI/05/2015/HOC/01**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERWAKILAN RI DI YANGON  
TAHUN 2015 - 2019**

**KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategis penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada periode 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perwakilan Republik Indonesia di Yangon yang telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategis, dan program;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 mengamanatkan setiap Perwakilan Republik Indonesia menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri yang juga merupakan bagian penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Perwakilan Republik Indonesia di Yangon telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan Republik Indonesia di Yangon Tahun 2015-2019
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan Republik Indonesia di Yangon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 3882);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran negara 4012);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2006 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 3/P Tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Pengangkatan DR. Ito Sumardi sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Uni Myanmar, berkedudukan di Yangon;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;  
Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI YANGON TAHUN 2015-2019
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan Republik Indonesia di Yangon Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Perwakilan Republik Indonesia di Yangon tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan bagi :
1. Rencana Kerja (Renja) Perwakilan Republik Indonesia di Yangon;
  2. Koordinasi Perencanaan Kegiatan antar Pelaksana Fungsi dan Pelaksana Pendukung di Perwakilan Republik Indonesia di Yangon;
  3. Pengendalian Kegiatan Pembangunan Perwakilan Republik Indonesia di Yangon.
- KETIGA : Menginstruksikan kepada seluruh Pelaksana Fungsi dan Pelaksana Pendukung di Perwakilan Republik Indonesia di Yangon untuk:
1. Melaksanakan isi Program Kerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yangon  
Pada tanggal : 16 Mei 2015

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK REPUBLIK UNI MYANMAR,



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatNya, kami dapat menerbitkan Rencana Strategis Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon Tahun 2015 – 2019 sebagai wujud manajemen pelaksanaan tugas pemerintahan di luar negeri yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Rencana Strategis Kedutaan Besar Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019 dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015 – 2019.

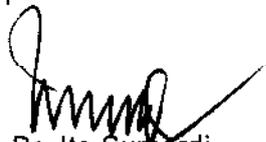
Rencana Strategis Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon Tahun 2015 – 2019 menyajikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta kerangka pendanaan.

Berdasarkan hasil rumusan Rencana Strategis Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon Tahun 2015 – 2019, maka Visi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon Tahun 2015 – 2019 adalah *“Menjadi ujung tombak dalam mewujudkan wibawa diplomasi Indonesia di berbagai bidang di Myanmar untuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia”*, dengan 2 (dua) misi, 3 (tiga) tujuan utama, 6 (enam) sasaran strategis, 6 (enam) arah kebijakan dengan strategi beserta alat ukur dan targetnya.

Kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon serta seluruh pemangku kepentingan di Indonesia yang telah bersama-sama membantu menyelenggarakan politik luar negeri di Myanmar. Semoga Rencana Strategis Kedutaan Besar Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri Indonesia di Myanmar dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Yangon, 31 Mei 2015

Kepala Perwakilan RI

  
Dr. Ito Sumardi  
Duta Besar LBBP  
31/5/15

## BAB I KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOT PERWAKILAN RI

### I. 1. Kondisi Umum

Hubungan diplomatik antara Indonesia-Myanmar secara resmi dijalin sejak dibukanya kantor *Indonesian Office* di Yangon pada tanggal 27 Desember 1949 yang kemudian ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar pada bulan April 1950. Pada tahun 1951, kedua negara menandatangani "*Treaty of Friendship*". Oleh karenanya, hubungan kedua negara pada masa-masa ini meraih titik kulminasi tertinggi sehingga dalam lawatan Presiden Soekarno ke Yangon pada tahun 1960, dinyatakan Myanmar sebagai "sahabat seperjuangan dan sepenanggungan untuk cita-cita kemerdekaan sejati".

Hubungan bilateral kedua negara sudah berjalan dengan sangat baik di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun bidang kekonsuleran. Tercatat Indonesia dan Myanmar telah melaksanakan 3 (tiga) kali *Joint Commission on Bilateral Cooperation* (JCBC). Pertemuan terakhir diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 11-12 Juni 2013. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai peningkatan kerjasama *capacity building* dalam peningkatan demokrasi, resolusi penyelesaian konflik, pengembangan sektor sosial-ekonomi, perdagangan dan investasi, energi, ketahanan pangan serta konektivitas *people-to-people contact*. Adapun dua pertemuan JCBC lainnya diselenggarakan di Yangon pada tanggal 27-28 Desember 2012 dan di Jakarta pada bulan Februari 2007.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Myanmar terus menguat dari tahun ke tahun selamat periode tahun 2010-2014. Hal ini antara lain terlihat dari meningkatnya intensitas kunjungan/pertemuan di tingkat pejabat tinggi baik yang berlangsung di Myanmar maupun dari pejabat Myanmar yang berkunjung ke Indonesia, khususnya dalam 2 tahun terakhir mulai tahun 2013 hingga 2014, dimana terdapat kunjungan kenegaraan Presiden RI pada bulan April 2013 serta kunjungan/kehadiran Presiden RI pada bulan Mei 2014 dan November 2014 saat berlangsungnya KTT ASEAN ke-24 dan ke-25 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Meningkat/menguatnya hubungan kerjasama bilateral juga terlihat jelas di bidang ekonomi, dimana kunjungan dari para pengusaha Indonesia ke Myanmar mengalami peningkatan cukup pesat. Jumlah pengusaha Indonesia yang ingin menjalin/mengembangkan usahanya di Myanmar meningkat, terutama sejak dirintisnya inisiatif mendorong masuknya BUMN-BUMN Indonesia maupun swasta ke Myanmar pada awal tahun 2013 yang dipuncaki dengan disepakatinya 7 (tujuh) MoU sebagai berikut:

#### G-to-G

1. *MoU Capacity building* (Kemlu RI dan MOFA Republik Uni Myanmar)
2. *MoU on Rice Trade* (Kemdag RI dan *Ministry of Commerce*)
3. *Framework Agreement on Trade & Investment* (Kemdag RI dan *Ministry of National Planning & Economic Development*)

#### B-to-B (G)

1. *MoU on Reduction of Loss Energy* (PT PLN & Kementerian Kelistrikan)
2. *MoU Capacity building on Banking* (PT BNI Tbk dan KBZ Bank)
3. *MoU on Fertilizer* (PT Pupuk Indonesia dan MAPCO)
4. *MoU on Construction* (PT WIKA dan UMG Myanmar)

Disamping itu, hubungan kerjasama ekonomi kedua negara khususnya di bidang perdagangan juga mengalami peningkatan dimana nilai perdagangan Indonesia – Myanmar pada periode 2013 - 2014 telah mencapai sebesar US\$ 496 juta meningkat cukup pesat dibanding periode tahun 2012-2013 yang mencapai US\$ 226.77 juta. Tercatat pada periode tahun 2014-2015 total nilai perdagangan RI-Myanmar mencapai US\$ 636.60 juta (data terlampir).

#### Nilai Perdagangan Myanmar - Indonesia (dalam juta US\$)

Tahun	Ekspor	Impor	Total
April 2009 - Maret 2010	37.43	140.07	177.50
April 2010 - Maret 2011	41.11	275.49	316.60
April 2011 – Maret 2012	40.94	431.82	472.76
April 2012 – Maret 2013	31.54	195.23	226.77
April 2013 – Maret 2014	60.04	438.82	498.86
April 2014 – Maret 2015	86.090	550.513	636.60

Sumber: Customs Data, Ministry of Commerce, Rep. of the Union of Myanmar

Diharapkan nilai perdagangan bilateral tersebut dapat lebih meningkat guna mencapai target nilai perdagangan Indonesia dan Myanmar sebesar US\$ 1 milyar pada tahun 2016 mendatang sesuai dengan komitmen kedua Kepala Negara pada saat kunjungan Kenegaraan Presiden RI, Bp. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono ke Myanmar pada tanggal 23-24 April 2013, yang juga telah ditegaskan kembali pada saat kehadiran Presiden RI Bp. Ir. Joko Widodo di sela-sela pelaksanaan KTT ASEAN ke-25 di Nay Pyi Taw, 12-13 November 2014.

Selanjutnya, terkait nilai investasi Indonesia di Myanmar juga mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari total nilai investasi Indonesia di Myanmar hingga periode Maret 2015 telah mencapai US\$ 241 juta melalui 12 proyek di berbagai sektor seperti sektor minyak dan gas, peternakan, farmasi dan *machinery*. Jika dibandingkan dengan besarnya sumber daya alam serta jumlah populasi yang dimiliki oleh Myanmar, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah FDI (*foreign direct investment*) Indonesia masih relatif kecil, dan memiliki potensi peluang dan pengembangan yang cukup besar kedepannya.

Adapun beberapa perusahaan Indonesia yang telah ada dan beroperasi di Myanmar, antara lain:

1. JAPFA Comfeed (*market share* sebesar 40% atau terbesar di Myanmar)
2. PT. Gunanusa Utama Fabricators
3. PT. Kalbe Farma Co Ltd
4. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk
5. PT. Telkom Internasional (Telin) Indonesia

6. Gold Petrol
7. Deka Medika
8. Win Strategic Company Ltd
9. Istech Energy EP-5 Pte Ltd/UMG Myanmar

Selanjutnya, terdapat beberapa perusahaan/BUMN yang juga tengah menjalin kerjasama di Myanmar, antara lain:

1. PT. Pertamina (Persero) Tbk
2. PT. BNI (Persero) Tbk
3. PT. Timah (Persero) Tbk
4. PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk
5. PT. Semen Indonesia
6. PT. Garuda Indonesia (Persero)
7. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk
8. PT. Kawasan Berikat Nusantara
9. PT. Sumber Jaya Indah
10. CV. Karya Hidup Sentosa "Quick" Tractor
11. Lippo Group

Selain itu, terdapat pula beberapa perusahaan asing yang memperkerjakan tenaga kerja ahli Indonesia di sektor tekstil/garmen, sepatu, konstruksi/permesinan (UMG), infrastruktur pelabuhan, bandara, dan terminal (*Asia World*).

Di bidang kekonsuleran, KBRI Yangon mengupayakan untuk dapat dilakukan kegiatan Pemutakhiran Data WNI yang menetap di wilayah negara Myanmar. Secara reguler dilakukan kegiatan yang dapat menjangkau masyarakat Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kekonsuleran ke wilayah-wilayah konsentrasi masyarakat Indonesia seperti, pelayanan "jemput bola", perluasan dan penguatan jejaring komunikasi dan kerjasama dengan menggunakan beragam jenis media, serta mendukung komunitas masyarakat Indonesia yang terangkum dalam wadah Kerukunan Indonesia di Myanmar (KIM).

Kegiatan Pemutakhiran Data WNI pernah dilakukan oleh KBRI Yangon, terakhir pada tahun 2013 di beberapa kota besar di Myanmar yang menjadi pusat komunitas masyarakat Indonesia seperti kota Bago (Bago Region); kota Mandalay (Mandalay Region); kota Mawlamyine (Mon State), kota Taketha (Yangon Region) serta kota Myeik (Tanintharyi Region). Berdasarkan kegiatan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar WNI berdomisili di Yangon bekerja sebagai tenaga ahli/profesional di bidang garmen, peternakan, dan pabrik kayu (Bago Region, Mandalay Region, dan Yangon Region), sebagai rohaniawan Budha (Mon State), dan sebagai anak buah kapal (Tanintharyi).

Sejak tahun 2010 hingga sekarang, jumlah WNI yang menetap di Myanmar menunjukkan gejala kenaikan yang sangat signifikan. Sebagai gambaran peningkatan tersebut adalah jumlah WNI yang terdata oleh KBRI Yangon jumlahnya

terus bertambah. Kenaikan jumlah WNI sejak tahun 2010-2015 tercatat sebagai berikut:

Periode	Jumlah WNI
Desember 2010	189 orang
Desember 2011	244 orang
Desember 2012	287 orang
Desember 2013	402 orang
Desember 2014	518 orang
akhir April 2015	557 orang

Sumber : Fungsi Konsuler, KBRI Yangon, 2015

Sepanjang 2010-2014, KBRI Yangon telah menangani beberapa kasus yang melibatkan WNI yang berada di Myanmar seperti kasus kematian, kecelakaan kerja, kekerasan rumah tangga, penahanan ABK WNI. Total sebanyak 15 kasus WNI telah ditangani oleh KBRI Yangon dan hampir seluruhnya dapat diselesaikan.

Di bidang penerangan, sosial dan budaya, hubungan Indonesia dan Myanmar mengalami perkembangan positif yang ditandai dengan peningkatan jumlah dan jenis *people-to-people contact* diantara kedua negara, peningkatan jumlah partisipasi Myanmar dalam berbagai program *capacity building* Indonesia (pelatihan, pendidikan maupun beasiswa), dan peningkatan pencitraan serta *exposure* Indonesia di media-media setempat. Selain itu, pergelaran seni budaya Indonesia yang diadakan oleh KBRI Yangon juga terus mendapatkan dinamika dan perhatian serta antusiasme dari masyarakat Myanmar.

Selama periode 2010-2014, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menambah khazanah hubungan Indonesia dan Myanmar pada bidang sosial dan budaya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pagelaran dan Promosi Seni Budaya Indonesia, seperti:
  - Pelaksanaan *7<sup>th</sup> Indonesian Culinary and Culture Fair*, tanggal 18-26 Maret 2013, di Hotel Park Royal, Yangon
  - Pembukaan Rumah Budaya (PINKI), Desember 2013
  - *ASEAN Culture Fair*, Tahun 2014
  - *Joint Culture Show* Indonesia-Myanmar, Agustus 2014
  - Peringatan Hubungan Bilateral Indonesia-Myanmar ke- 65, Strand Hotel, 19 Desember 2014.
- b. Revitalisasi Kerukunan Indonesia di Myanmar (KIM) atau *Association of Indonesia in Myanmar (AIM)* yang merupakan organisasi masyarakat Indonesia dalam rangka upaya meningkatkan *people-to-people contact*.
- c. Pendekatan dengan media lokal agar dapat lebih mengenal dan memahami Indonesia, melalui berbagai program seperti pengiriman jurnalis Myanmar ke Indonesia untuk berbagai pelatihan serta melibatkan media sebagai *partner* untuk mendukung program kerja KBRI Yangon pada khususnya;
- d. *Capacity building* seiring dengan kebijakan *constructive engagement* Pemerintah Indonesia;

e. Bantuan Kemanusiaan, terutama terkait dengan isu muslim Rohingya yang merupakan *concern* Indonesia dalam berbagai forum regional maupun internasional, seperti:

- Ditandatanganinya MOC antara PMI dan MEC, September 2012 dalam rangka kemanusiaan dalam menangani para pengungsi di Rakhine. PMI juga mengirimkan sejumlah bantuan dalam beberapa tahap yang dipimpin oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla.
- Bantuan dari para NGOs seperti ACT, PKPU, Dompot Dhuafa, MERC, Baznas, dan bantuan kemanusiaan yang terakhir ke Rakhine State adalah bantuan 1 mobil ambulans pada tahun 2015 dari MERC
- Bantuan dari Pemerintah Indonesia US\$1,000,000 untuk pembangunan 4 (empat) sekolah yang masing-masing dilengkapi dengan ruang multi fungsi dengan perincian sbb:
  - 1) 1 (satu) di desa Sambalay, Minbya Township
  - 2) 1 (satu) di desa Thaykan, Minbya Township
  - 3) 1 (satu) di desa Mawrawaddy, Maungdaw Township
  - 4) 1 (satu) di desa Buthidaung Township, Thapyaygone Village.Sekolah tersebut telah diresmikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan Duta Besar RI Yangon, 7 Desember 2014.

Selain itu, KBRI Yangon juga melakukan penguatan diplomasi publik melalui Sekolah Indonesia di Yangon yang diperkaya dengan standar internasional dan mulai menerima anak didik dari warga asing, terutama warga negara Myanmar. Pada bulan Desember 2014, tercatat 517 orang siswa belajar di *Indonesian International School Yangon* (IISY), dimana 451 orang adalah warga negara Myanmar.

KBRI Yangon terus berupaya untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan Myanmar antara lain dengan menawarkan sejumlah program kerja sama teknis dalam berbagai bidang, serta saling dukung dalam fora internasional. KBRI Yangon aktif mengirimkan brosur/promosi TTI (perdagangan, pariwisata dan investasi), dan memberikan penawaran beasiswa pendidikan Pemri berupa program Darmasiswa dan beasiswa kemitraan negara berkembang (KNB) kalangan pemerintahan dan civitas akademika serta mahasiswa/i Myanmar untuk menimba ilmu di Indonesia. Selanjutnya, KBRI Yangon juga senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Republik Uni Myanmar dalam bidang kekonsuleran dan Perlindungan WNI.

Hubungan kerjasama Indonesia dan Myanmar dalam kerangka regional di tingkat kawasan antara lain terlihat dari kerjasama kedua negara pada saat Keketuaan ASEAN oleh Indonesia pada tahun 2011, dan juga pada saat Keketuaan ASEAN oleh Myanmar pada tahun 2014. Selama setahun penuh Myanmar telah berhasil menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai pertemuan ASEAN di sejumlah daerah/kota Myanmar, terutama ibukota Nay Pyi Taw dan Yangon serta beberapa kota lainnya. Keberhasilan Myanmar tersebut tidak lepas dari dukungan dan peran serta Pemerintah RI dan khususnya KBRI Yangon yang berada di garis depan dalam berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait di Myanmar.

## **I. 2. Analisis SWOT**

Di Myanmar, Indonesia dipandang semakin memiliki posisi dan peranan yang penting. Sebagai salah satu sahabat dekat Myanmar sejak lama, Indonesia perlu memanfaatkan posisi tersebut secara maksimal bagi kepentingan nasional. Optimalisasi diplomasi dilakukan dengan memaknai secara positif berbagai peluang yang menguntungkan bagi kepentingan nasional yang muncul.

**a. Strength**

Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam Kerjasama ASEAN di negara akreditasi (Myanmar) terus mengedepan dalam periode 2010-2014. Hal ini terlihat pada saat Keketuaan Indonesia pada tahun 2011, dimana Indonesia telah berperan membantu meyakinkan negara-negara anggota ASEAN lainnya terkait mandat yang diberikan kepada Myanmar untuk menjadi Ketua ASEAN tahun 2014.

Kemudian, pada saat Myanmar menjabat sebagai Ketua ASEAN 2014, Indonesia juga turut membantu dan mendukung keberhasilan Myanmar melaksanakannya mandat Keketuaan ASEAN tersebut selama setahun penuh. Selanjutnya, peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerjasama ASEAN di Myanmar, perlu terus diperkuat dari waktu ke waktu mengingat Myanmar merupakan sahabat dekat Indonesia sejak lama, yang turut menjadi salah satu kunci bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Hubungan yang baik antara Indonesia dan Myanmar yang sudah terbina cukup lama, memberikan kemudahan-kemudahan tersendiri dalam pelaksanaan perlindungan WNI dan BHI antara lain batas wilayah kelautan mengingat banyaknya nelayan yang terdampar di Myanmar. Namun pelaksanaannya harus perlu dimulai dengan menyusun terlebih dahulu prinsip-prinsip/landasan hukum (MoU atau *Agreement*) kerjasama kekonsuleran kedua negara agar bisa melandasi secara kuat proses penyelesaian berbagai kasus WNI atau perlindungan WNI yang ada.

Hubungan yang baik di bidang politik tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pula bagi peningkatan/penguatan hubungan kerjasama di bidang ekonomi dan bidang-bidang terkait lainnya.

**b. Weakness**

Seiring dengan terbukanya Myanmar terhadap dunia luar, Myanmar masih berupaya melakukan beberapa perubahan terkait UU atau regulasi di berbagai bidang. Hal ini tercermin dengan disahkannya UU FDI baru di Myanmar pada tanggal 2 November 2012 lalu yang diharapkan dapat menarik datangnya lebih banyak investasi asing ke Myanmar, UU Media pada bulan Juli 2013 oleh Majelis Rendah (Pyithu Hluttaw), serta UU yang mengatur zona ekonomi khusus di Myanmar yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik uNi Myanmar U Thein Sein pada tanggal 23 Januari 2014.

Selanjutnya, terdapat pula adanya kekhawatiran dari sejumlah pengusaha maupun BUMN yang hendak menjalin kerjasama ekonomi di Myanmar, sebagai akibat dari belum mantapnya UU maupun regulasi terkait investasi serta kondisi politik yang dianggap masih belum kondusif di Myanmar.

**c. Opportunity**

Meningkatnya kerjasama antara Indonesia – Myanmar khususnya di forum ASEAN memberikan dampak positif bagi hubungan kedua negara yang berpengaruh kepada semakin meningkatnya intensitas kunjungan antar para pejabat tinggi kedua negara. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kerjasama kedua negara khususnya di bidang pelayanan dan perlindungan warga negara serta keimigrasian antar kedua negara.

Terkait telah disetujunya perjanjian bebas visa antar kedua negara yang ditandatangani disela kegiatan KTT ASEAN ke-24 pada tanggal 10 Mei 2014 dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa bagi pemegang paspor biasa Warga Negara Indonesia dapat berkunjung ke Myanmar untuk kunjungan singkat dengan masa tinggal maksimum 14 hari dan bagi Warga Negara Myanmar dapat berkunjung ke Indonesia untuk kunjungan singkat dengan masa tinggal maksimum 30 hari. Hal ini sangat berpotensi meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia-Myanmar di berbagai bidang, disamping juga berpeluang memunculkan permasalahan konsuler dan imigrasi bagi WNI di Myanmar.

Potensi atau peluang kerjasama di bidang ekonomi semakin terbuka luas seiring dengan semakin terbukanya perekonomian Myanmar dalam beberapa tahun terakhir sejak pemerintahan sipilnya berdiri pada akhir Maret 2011 lalu. Sejumlah sektor potensial bagi peningkatan/penguatan kerjasama ekonomi dengan kalangan pengusaha/BUMN Indonesia antara lain di sektor pertanian, pertambangan dan energi, infrastruktur/konstruksi, industri, telekomunikasi, transportasi, perbankan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

#### d. *Threat*

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kekonsuleran, KBRI Yangon terkadang menghadapi beberapa hambatan, antara lain seperti sistem pengawasan dan pengambilan keputusan yang terpusat yang menyebabkan persetujuan dan keputusan akan memerlukan waktu yang cukup lama. Birokrasi di Myanmar masih terkesan lamban, walaupun Kementerian Luar Negeri Republik Uni Myanmar juga memfasilitasi dalam hal komunikasi dan koordinasi serta menindaklanjuti dengan Kementerian atau Instansi terkait lainnya.

Hambatan lainnya yang juga cukup mengganggu adalah masih buruknya sarana transportasi seperti jalan raya dan terbatasnya jasa angkutan. Hal ini merupakan hambatan lain bagi Kepala Perwakilan RI dan Staf dalam melakukan kunjungan ke daerah-daerah di wilayah Myanmar, khususnya ke daerah terpencil Myanmar.

Di bidang ekonomi, ancaman yang dihadapi antara lain adalah masih sangat kuatnya pengaruh dominan RRT dan beberapa negara tetangga yang berbatasan dengan Myanmar secara langsung seperti Thailand dan India, serta negara yang berperan sebagai perantara yaitu Singapura dalam pelaksanaan hubungan perdagangan dan investasi. Untuk itu, kalangan pengusaha BUMN atau swasta Indonesia dituntut untuk berlaku secara lebih pro-aktif dalam menjalin dan mengembangkan usahanya di Myanmar kedepannya.

<b>Strengths (S)</b>	<b>Weaknesses (W)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kemauan kedua pemerintahan untuk membina dan meningkatkan hubungan di segala bidang baik secara bilateral, regional maupun multilateral;</li> <li>• Adanya Komisi Bersama yang menjadi sarana untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang;</li> <li>• Hubungan diplomatik yang telah terbina cukup lama memberikan citra positif Indonesia di Myanmar;</li> <li>• Adanya keinginan dari Pemerintah Republik Uni Myanmar untuk menggunakan pengalaman dan cara-cara Indonesia dalam melakukan perubahan di Myanmar;</li> <li>• Sanksi ekonomi terhadap Myanmar secara bertahap telah dicabut/diperingsan, yang sekaligus menjadi daya tarik besar bagi negara-negara di kawasan untuk melakukan kegiatan ekonomi/bisnis di Myanmar;</li> <li>• Adanya dukungan yang mantap dari instansi terkait di Indonesia dalam melaksanakan upaya promosi Indonesia di negara akreditasi/wilayah kerja;</li> <li>• Adanya hubungan timbal balik yang sangat akrab di antara Kedutaan Besar negara-negara anggota ASEAN di Myanmar;</li> <li>• Hubungan baik yang terjalin dengan Indonesia selama ini diharapkan berpengaruh positif dalam hubungan kerjasama ekonomi dan bidang terkait lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya gerakan separatisme dan anti reformasi/demokrasi;</li> <li>• Belum adanya MoU antara kedua Angkatan Bersenjata;</li> <li>• Sarana transportasi dan komunikasi masih mengalami kendala;</li> <li>• Tidak adanya jalur pelayaran dan penerbangan langsung dari Indonesia dan sebaliknya;</li> <li>• Pemulihan ekonomi yang masih terus berlangsung dan melesunya ekonomi dunia;</li> <li>• Kurangnya kemandirian atau potensi para pengusaha Indonesia dalam melakukan promosi ke Myanmar dan sebaliknya;</li> <li>• Lambannya koordinasi antar instansi di pemerintahan Myanmar;</li> <li>• Kedudukan pusat pemerintahan (ibukota) Myanmar yang sudah dipindahkan ke Nay Pyi Taw sehingga mempersulit ruang waktu koordinasi dan <i>monitoring</i>;</li> <li>• Suasana pemerintahan Republik Uni Myanmar yang belum sepenuhnya terbuka terhadap dunia luar;</li> <li>• Regulasi/peraturan terkait yang belum sepenuhnya stabil;</li> <li>• Sanksi ekonomi terhadap Myanmar yang belum sepenuhnya dihapus/dicabut, yang kenyataannya lebih berdampak pada rakyat Myanmar yang miskin, bodoh, dan terbelakang;</li> <li>• Terbatasnya sumber daya manusia di Perwakilan.</li> </ul>

<b>Opportunities (O)</b>	<b>Threats (T)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen dan kesungguhan kedua pemerintahan/negara untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan di semua bidang;</li> <li>• Kesamaan pandangan politik luar negeri kedua negara yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar kerjasama bilateral dan di fora regional serta multilateral;</li> <li>• Adanya sejumlah MoU Kerjasama di sejumlah bidang ekonomi sektor terkait yang ditandatangani pada saat Kunjungan Kenegaraan Presiden RI di Myanmar, April 2013, yang perlu ditindaklanjuti;</li> <li>• Terdapat potensi/peluang peningkatan kerjasama investasi dan perdagangan Indonesia di Myanmar kedepanya;</li> <li>• Terbukanya kesempatan peningkatan saling kunjung antar para pengusaha dari kedua negara yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar;</li> <li>• Ada komitmen dan kesungguhan kedua negara serta para pemangku kepentingan di negara masing-masing untuk saling meningkatkan hubungan di bidang ekonomi dan keuangan, terutama terkait investasi, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata;</li> <li>• Adanya Sekolah Internasional Indonesia di Yangon (<i>Indnesian International School Yangon/II SY</i>) yang dapat menjadi sarana peningkatan/penguatan penerangan dan citra positif serta sebagai bagian dari pelaksanaan <i>soft-power diplomacy</i> RI di Myanmar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situasi dalam negeri Myanmar yang terkait dengan masih buruknya penegakan HAM dan kecenderungan sebagai negara yang masih belum sepenuhnya terbuka (akibat ketertutupannya selama 3 dekade sebelumnya);</li> <li>• Masih lambannya pelaksanaan proses dan program reformasi untuk menuju negara yang berlandaskan demokrasi;</li> <li>• Sarana telekomunikasi elektronik yang buruk dan masih tertutup;</li> <li>• Kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Uni Myanmar yang belum sepenuhnya mapan/stabil, yang diharapkan dapat menunjang hubungan kerjasama bilateral di banyak bidang;</li> <li>• Dampak dari ketertutupan pemerintahan sebelumnya yang masih cukup menghambat akses pertukaran informasi dan berita;</li> <li>• Kehati-hatian dari Pemerintah Republik Uni Myanmar yang sangat sensitif terhadap isu-isu tertentu, seperti isu konflik etnis bersenjata dan penanganan permasalahan di Rakhine State;</li> <li>• Masih rendahnya etos kerja masyarakat negara akreditasi;</li> <li>• Masih sangat kuatnya pengaruh dominan RRT dan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Myanmar seperti Thailand dan India, serta negara yang berlaku seperti perantara yaitu Singapura, menjadi saingan/hambatan utama bagi akses masuknya barang-barang produk Indonesia yang menjadi kebutuhan Myanmar.</li> </ul>

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN RI

### II.1 Visi Perwakilan RI

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati kondisi yang ada, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar menetapkan Visi:

***“Menjadi ujung tombak dalam mewujudkan wibawa diplomasi Indonesia di berbagai bidang di Myanmar untuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia”***

***Menjadi ujung tombak*** adalah menjadi misi yang dapat diandalkan sebagai satu-satunya Perwakilan RI di Myanmar

***Mewujudkan wibawa diplomasi*** adalah melaksanakan penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan negara lain yang disegani dan dihormati oleh dunia internasional karena peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional

***Memberikan manfaat*** adalah mendatangkan kegunaan

***Peningkatan kesejahteraan*** adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb) untuk suatu hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman

### II.2 Misi Perwakilan RI

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon telah menetapkan 2 (dua) misi selama kurun waktu 2015 – 2019, sebagai berikut:

1. Memperkuat peran KBRI Yangon dalam memajukan kepentingan nasional di negara akreditasi;
2. Meningkatkan kapasitas KBRI Yangon yang mumpuni dalam mendukung misi diplomasi di negara akreditasi;

**Misi 1:**  
***Memperkuat peran KBRI Yangon dalam memajukan kepentingan nasional di negara akreditasi.***

***Memperkuat*** adalah menjadikan lebih kuat dari kondisi sebelumnya

***Peran*** adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif

***Memajukan*** adalah mencapai atau membawa kepada suatu keadaan yang lebih baik

***Kepentingan Nasional*** adalah amanat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pada periode 2010-2014 difokuskan pada pencapaian Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan

**Misi 2:**  
**Meningkatkan kapasitas KBRI Yangon yang mumpuni dalam mendukung misi diplomasi di negara akreditasi**

**Meningkatkan** adalah menaikkan; mempertinggi; memperhebat

**Kapasitas** adalah keluaran maksimum; kemampuan yang dimiliki

**Mumpuni** adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik; menguasai keahlian (kecakapan, keterampilan) tinggi

**Misi Diplomasi** adalah keputusan yg dikirimkan oleh suatu negara ke negara lain untuk melakukan tugas khusus di bidang diplomatik, politik, perdagangan, kesenian, dsb dalam urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yg lain; atau urusan kepentingan sebuah negara dng perantaraan wakil-wakilnya di negeri atau pengetahuan dan kecakapan di hal perhubungan antara negara dan negara;

**II.3 Tujuan Perwakilan RI**

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, 3 (tiga) Tujuan KBRI yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**"Meningkatnya Hubungan Bilateral Indonesia dengan Myanmar di Segala Aspek melalui Wibawa Diplomasi guna Peningkatan Kesejahteraan Negara dan Bangsa Indonesia"**

**Meningkatnya Hubungan Bilateral** adalah peningkatan hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya politik, budaya dan ekonomi di antara kedua negara;

**Wibawa Diplomasi** adalah penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan negara lain yang disegani dan dihormati oleh dunia internasional karena peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional;

**Memberikan Manfaat** adalah menghasilkan hal yang berguna;

**Peningkatan** adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan;

**Kesejahteraan Negara dan Bangsa Indonesia** adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman wilayah dan penduduk Indonesia;

INDIKATOR	INDUKSI	PERSENTASE	SYANG DIHARAPKAN
Meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dalam berbagai bidang dengan negara akreditasi dalam rangka memajukan kepentingan nasional.	Peningkatan kegiatan saling kunjung antar pejabat	5%	10%
	Peningkatan jumlah realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari	5%	10%

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019
	kesepakatan bilateral					
	Penyelesaian atas permasalahan WNI dan BHI	80%				83%
	Peningkatan kepuasan responden atas pelayanan kekonsuleran	5%				10%
Meningkatkan neraca TTI (perdagangan, pariwisata dan investasi) dalam rangka mendukung diplomasi ekonomi	Nilai Total Perdagangan	USD 600 juta				USD 1.000 juta
	Jumlah wisatawan	900 orang				1200 orang
	Nilai investasi	USD 250 juta				USD 300 juta
Meningkatkan citra positif Indonesia di negara akreditasi	Peningkatan citra positif Indonesia di negara akreditasi	60%				75%

#### II.4 Sasaran Strategis Perwakilan RI

6 (enam) Sasaran Strategis utama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon yang hendak dicapai pada periode 2015–2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya dukungan negara akreditasi Myanmar terhadap kedaulatan NKRI/ pembangunan infrastruktur kemaritiman/ kerjasama bilateral dan isu-isu global

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya dukungan negara akreditasi Myanmar terhadap kedaulatan NKRI/ pembangunan infrastruktur kemaritiman/ kerjasama bilateral dan isu-isu global.	Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Yangon yang ditindaklanjuti <i>Stakeholders</i>	80%	80%	80%	80%	80%

2. Peningkatan peran Perwakilan RI dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di negara akreditasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan peran Perwakilan RI dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di negara akreditasi	Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/ kesepakatan	80%	80%	80%	80%	80%

3. Peningkatan peran KBRI Yangon dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan peran KBRI Yangon dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia	Presentasi peningkatan <i>trade, tourism, and investment</i> (TTI)	80%	80%	80%	80%	80%

4. Menguatnya peran *soft power* diplomasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI di negara akreditasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Menguatnya peran <i>soft power</i> diplomasi yang dilakukan oleh KBRI di Myanmar	Persentase publik di Myanmar yang berpandangan positif terhadap Indonesia	80%	80%	84%	84%	85%

5. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, serta pemberdayaan diaspora

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di Myanmar	Persentase permasalahan WNI dan BHI di Myanmar yang diselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%
	Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran	80%	80%	80%	80%	80%

6. Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan yang dilakukan Itjen dan BPO	65	66	67	68	70
	Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap Alokasi DIPA Perwakilan	91%	91%	91%	92%	92%

## PENUTUP

Rencana Strategis KBRI Yangon Tahun 2015 – 2019 merupakan dokumen yang disusun sebagai rujukan bagi pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis KBRI Yangon selama periode tersebut. Sebagai dasar dari perencanaan kinerja KBRI Yangon, Renstra ini selanjutnya akan dituangkan dan dijabarkan ke dalam paket perencanaan kinerja tahunan, yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KBRI Yangon untuk periode yang sama (5 tahun) yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019.

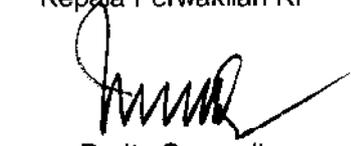
Penerapan Renstra di dalam RKT akan diimplementasikan berdasarkan prioritas Tujuan dan Sasaran pada masing-masing tahun, dan diharapkan agar Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut dapat dicapai semaksimal mungkin. Disamping itu Renstra KBRI Yangon tahun 2015 – 2019 ini disusun sebagai upaya Perwakilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar lebih terarah, terukur, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Renstra KBRI Yangon 2015 - 2019 KBRI Yangon ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai berupa dana dan sumber daya manusia yang tersedia serta adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah atau swasta setempat, yang didukung oleh situasi dan kondisi pemerintahan di wilayah kerja yang cukup kondusif dan stabil, serta adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pusat dan Perwakilan.

Akhirnya diharapkan, Renstra KBRI Yangon 2015 – 2019 ini dapat dijadikan rujukan seluruh staf KBRI Yangon dalam jangka waktu 5 tahun mendatang dalam melaksanakan kegiatan operasional perwakilan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai sarana umpan balik demi keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan di masa mendatang.

Yangon, 31 Mei 2015

Kepala Perwakilan RI

  
Dr. Ito Sumardi  
Duta Besar LBBP

1/5/15

Lampiran I : Matriks Arah Kebijakan dan Strategi

No	Arah Kebijakan Kemlu	Strategi Kemlu	Strategi KBRI Yangon
1.	Penguatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN	Memperjuangkan prakarsa Indonesia di ASEAN dan forum terkait ASEAN dalam mewujudkan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera, sejalan dengan tujuan dan target ketiga pilar masyarakat ASEAN	Terus melakukan pendekatan kepada Pemerintah Myanmar melalui kementerian/instansi terkait guna memberikan dukungan bagi prakarsa Indonesia di ASEAN dan forum terkait lainnya
		Mendorong kohesivitas dan sentralitas ASEAN dalam hubungan internal dan eksternal, serta terlibat aktif dalam penyelesaian masalah regional dan internasional	Terus berusaha memberikan keyakinan bagi Pemerintah Myanmar terkait pentingnya kohesivitas dan sentralitas ASEAN di tingkat regional/internasional
		Memantapkan implementasi Traktat <i>South East Asia Nuclear Weapon Free Zone</i> (SEANWFZ) dan <i>Plan of Action 2013-2017</i> serta mendorong ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh <i>Nuclear-Weapon States</i> (AS, Inggris, RRT, Rusia, Prancis)	Mendorong keyakinan Pemerintah Myanmar sebagai sesama negara anggota ASEAN terkait implementasi SEANWFZ dan <i>Plan of Action 2013-2017</i> serta ratifikasi Protokol Traktat terkait oleh NWS
		Mendorong universalisasi TAC ( <i>Treaty of Amity and Cooperation</i> ) dan implementasi <i>Bali Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations</i> ( <i>Bali Principles</i> ) ke kawasan yang lebih luas.	Mendorong keyakinan Pemerintah Myanmar sebagai sesama negara anggota ASEAN terkait pentingnya TAC dan implementasi <i>Bali Declaration</i> ke kawasan yang lebih luas
		Meningkatkan peran Indonesia dalam pengelolaan konflik kawasan termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN, terutama mendorong implementasi secara efektif dan menyeluruh <i>Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)</i> , termasuk penyelesaian <i>code of conduct in the South China Sea</i> , serta melalui upaya-upaya <i>preventive diplomacy</i> .	Terus berusaha meyakinkan Pemerintah Myanmar terkait perlunya pengelolaan konflik di kawasan melalui mekanisme ASEAN, termasuk pentingnya implementasi DoC dan CoC serta upaya-upaya <i>preventive diplomacy</i> yang dimungkinkan bagi terus terpeliharanya stabilitas dan perdamaian di kawasan
		Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mendorong kerja sama ASEAN dengan mitra wicara ASEAN serta <i>ASEAN-led</i>	Terus mendorong dan memberikan keyakinan bagi Pemerintah Myanmar terkait pentingnya peran sentral

No.	Arah Kebijakan Kemlu	Strategi Kemlu	Strategi KBBN yang
		<i>mechanisms</i> secara lebih produktif dan konstruktif bagi penciptaan arsitektur kawasan yang sejalan dengan kepentingan nasional.	ASEAN, termasuk Indonesia dalam upaya terciptanya arsitektur kawasan yang damai dan stabil sejalan dengan kepentingan nasional
		Meningkatkan kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal secara lebih sejajar dan saling menguntungkan.	Terus meyakinkan perlunya upaya meningkatkan kerjasama ASEAN dengan pihak eksternal secara saling menguntungkan
		Menyelesaikan visi Masyarakat ASEAN 2025 beserta dokumen pendukung ( <i>attendand documents</i> ) mengenai ketiga pilar Masyarakat ASEAN, serta mengawal pelaksanaannya sejalan dengan kepentingan nasional.	Bersama-sama pihak terkait di Myanmar, berusaha untuk bersiap menyongsong dan menyelesaikan visi Masyarakat ASEAN 2025 khususnya tiga pilar penting dan mengawalnya sehingga dapat sejalan dengan kepentingan nasional
		Mendorong penguatan Sekretariat ASEAN yang mampu melaksanakan mandatnya secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi ASEAN.	Terus mendorong pentingnya penguatan peran Sekretariat ASEAN untuk melaksanakan tugas-tugas kedepannya secara lebih baik seiring dengan perkembangan dan tantangan di tingkat regional
		Memperkuat fungsi koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang Masyarakat ASEAN, memantapkan posisi nasional dalam pertemuan ASEAN, serta implementasi kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.	Berusaha secara berkesinambungan untuk memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang Masyarakat ASEAN, serta pula pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN di tingkat nasionalnya
		Meningkatkan peran dan kontribusi Pusat Studi ASEAN dan lembaga <i>think tank</i> lainnya dalam perumusan kebijakan nasional terkait kerja sama ASEAN.	Terus mendorong pentingnya peran dan kontribusi Pusat Studi ASEAN sekiranya telah ada dan lembaga <i>think tank</i> terkait lainnya dalam pembuatan kebijakan nasional terkait kerjasama ASEAN
2.	Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara middle power di dunia internasional	Mengintensifkan kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti: terorisme, penyelundupan manusia, dan perdagangan orang.	Menginisiasi kerja sama antar lembaga yang menangani bidang penegakan hukum dan terorisme dalam rangka mengantisipasi kejahatan transnasional
		Meningkatkan kerja sama peningkatkan kapasitas melalui skema Kerja sama Selatan-	Mengidentifikasi dan menawarkan program kerja sama teknik yang diperlukan

No	Arah Kebijakan Kemlu	Strategi Kemlu	Strategi KBRI/Anjoran
		Selatan (KSS) dan triangular untuk mendukung politik luar negeri.	negara akreditasi dalam kerangka KSST
		Menggunakan diplomasi publik yang berkarakter <i>soft power</i> Indonesia melalui kerja sama kebudayaan, pemberian beasiswa, <i>people to people contact</i> , jejaring diaspora Indonesia.	Membuat daftar atau database <i>friends of Indonesia</i> untuk melakukan penggalangan guna meningkatkan citra positif terhadap Indonesia
		Mengelola dan memperkuat jaringan alumni asing penerima beasiswa Indonesia dan jaringan alumni WNI penerima beasiswa asing untuk memperkuat diplomasi publik.	Melakukan penggalangan serta pembinaan terhadap alumni asing penerima beasiswa Indonesia melalui " <i>Alumni Gathering</i> " serta membentuk kepengurusan, dan membangun jaringan alumni WNI penerima beasiswa asing
		Memperluas dan meningkatkan akses pasar bagi produk barang dan jasa Indonesia, serta meningkatkan arus investasi, dan pariwisata ke Indonesia, serta mendorong perlindungan pasar domestik dari praktek perdagangan yang tidak adil.	Meningkatkan promosi TTI dengan melibatkan secara lebih aktif partisipasi dari kalangan pelaku usaha Indonesia serta kalangan pemangku kepentingan terkait dari negara akreditasi
3.	Penguatan diplomasi ekonomi	Memperkuat diplomasi Indonesia pada pasar prospektif	Mengembangkan jejaring bisnis dan market intelligent produk Indonesia yang menjadi kebutuhan di negara akreditasi
		Mendorong perluasan potensi perdagangan, investasi, pariwisata.	Membangun dan mengembangkan kerangka kerja sama/kesepakatan bagi pengembangan TTI.
		Mendorong implementasi kerja sama perdagangan dan investasi yang berimbang dan berkelanjutan	Meningkatkan/memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang perdagangan dan investasi
4.	Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri serta pemberdayaan diaspora	Memperkuat sistem kelembagaan Perlindungan WNI/BHI di dalam negeri dan luar negeri dengan memperhatikan aspek pencegahan ( <i>prevention</i> ), deteksi dini ( <i>early detection</i> ), dan perlindungan secara cepat dan tepat ( <i>immediate response</i> ).	Memperkuat konsolidasi penanganan kasus WNI/ BHI diantara pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri melalui pembentukan sistem komunikasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

No.	Arah Kebijakan Kemlu	Strategi Kemlu	Strategi KBRI Yangon
		Mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan, deteksi dini dan cepat tanggap dalam penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri.	Memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait di negara akreditasi, khususnya pihak keimigrasian dan kepolisian untuk mendeteksi permasalahan/ kasus WNI di negara akreditasi lebih cepat
		Memperkuat sinergi dalam Perlindungan WNI di luar negeri dengan Komunitas Indonesia di luar negeri serta pelayanan dan pemberdayaan Diaspora dan Masyarakat Madani.	Memperkuat koordinasi dan keterlibatan komunitas Indonesia di negara akreditasi dalam melakukan penanganan permasalahan WNI/ BHI
		Memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan.	Memastikan terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI secara cepat dan tepat
5.	Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan	Mendorong implementasi komitmen nasional atas kesepakatan bilateral.	Mengupayakan tindak lanjut atas berbagai kesepakatan bilateral dalam berbagai bidang melalui koordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait.
		Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut/ implementasi oleh pemangku kepentingan atas hasil diplomasi atau kesepakatan internasional.	Melakukan telaah terhadap tindak lanjut pemangku kepentingan atas berbagai kesepakatan bilateral dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang
		Melakukan penataan organisasi yang adaptif, peningkatan evaluasi kinerja, dan tata kelola Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.	Memantapkan pelaksanaan 3T+1A (tertib fisik, tertib waktu, tertib administrasi dan aman).
6.	Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis teknologi informasi	Memperkuat sistem manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dengan dukungan IT.	Mengoptimalkan sistem manajemen kinerja KBRI Yangon melalui pemanfaatan teknologi informasi.
		Mewujudkan manajemen SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis kompetensi dan kinerja yang transparan dan akuntabel.	Melakukan evaluasi terhadap kinerja para pegawai KBRI Yangon secara berkala
		Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi berdasarkan IT <i>Master Plan</i> Kementerian Luar Negeri.	Menerapkan sistem komunikasi dan teknologi informasi sesuai standar yang tertuang dalam IT <i>Master Plan</i> Kementerian Luar Negeri.

No.	Arah Kebijakan Kemlu	Strategi Kemlu	Strategi KBRI Yangon
		Meningkatkan anggaran Kementerian Luar Negeri dan memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja.	Melakukan penyusunan anggaran KBRI Yangon yang berbasis pada penyerapan dan realisasi anggaran
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja Kementerian Luar Negeri.	Mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana penunjang kinerja KBRI Yangon.
		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Menyusun laporan keuangan KBRI Yangon secara tepat waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

Lampiran II: Matriks Target Kinerja

Program/ Kegiatan	Sasaran/program/ Output/ Sasaran/ Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (Rp juta rupiah)				
			2016	2015	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar negeri	Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang profesional, Akuntabel (sesuai peraturan Perundangan), Efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna)	91%	91%	91%	92%	92%	24.189.211	25.398.672	25.640.564	25.882.456	26.124.348
Penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen pada Perwakilan RI	Terselenggaranya peningkatan pelaksanaan dukungan manajemen pada Perwakilan RI	Persentase terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	91%	91%	91%	92%	92%					
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri	Tingkat dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Luar Negeri	91%	91%	91%	92%	92%	222.552	232.552	242.552	252.552	262.552
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI	Jumlah Pembangunan/ pengadaan peningkatan gedung kantor/ wisma duta dan gedung lainnya	0%	0%	0%	0%	0%					
		Jumlah pengadaan/peningkatan <i>mechanical/ electric</i> /peralatan dan mesin	91%	91%	91%	92%	92%					

Pelaksanaan Diplomasi dan Kerja sama internasional pada Perwakilan RI	Meningkatnya kegiatan diplomasi dan kerja sama internasional	Indeks peningkatan kegiatan diplomasi dan kerja sama internasional	86,4	88,6	86,8	87	87,2	3.122,988	3.435,287	3.435,287	3.591,436	3.747,586
Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerja sama internasional	Terselenggaranya Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti stakeholders	80%	81%	82%	82%	83%					
		Persentase realisasi rencana aksi/inisiatif yang diimplementasikan	80%	80%	80%	81%	81%					
		Persentase peningkatan <i>trade, tourism and investment (TTI)</i>	80%	80%	80%	80%	80%					
		Persentase publik di negara akreditasi yang berpandangan positif terhadap Indonesia	80%	81%	82%	82%	83%					
		Persentase Permasalahan WNI dan BHI di Luar negeri yang diselesaikan	80%	81%	82%	82%	83%					
		Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran	80%	80%	80%	81%	83%					

### Lampiran III : Perhitungan Indeks Peran KBRI Yangon

Penentuan target indeks peningkatan kegiatan diplomasi dan kerja sama internasional dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang target keenam indikator kegiatan yang terdapat pada program penyelenggaraan diplomasi dan kerja sama internasional, yakni:

No	Indikator	Bobot
1.	Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Yangon yang ditindaklanjuti <i>Stakeholders</i>	20
2.	Persentase jumlah realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/ kesepakatan	15
3.	Persentase peningkatan trade, tourism, and investment (TTI)	30
4.	Persentase publik di Myanmar yang berpandangan positif terhadap Indonesia	10
5.	Persentase Permasalahan WNI dan BHI di negara akreditasi yang diselesaikan	20
6.	Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran	5

Berdasarkan indeks tersebut di atas, KBRI Yangon menetapkan PK dan proyeksi capaiannya dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Indikasi	Target PK	Proyeksi Capaian PK	Nilai Capaian PK	Bobot	Target Indeks
1.	Persentase jumlah rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Yangon yang di-tindaklanjuti <i>Stakeholders</i>	80%	80%	0,64	20	12.8
2.	Persentase jumlah realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/ kesepakatan	80%	90%	0,72	20	14.4
3.	Persentase peningkatan trade, tourism, and investment (TTI)	80%	90%	0.72	20	14.4
4.	Persentase publik di Myanmar yang berpandangan positif terhadap Indonesia	80%	95%	0.76	20	15.2
5.	Persentase Permasalahan WNI dan BHI di negara akreditasi yang diselesaikan	80%	90%	0,72	20	14.4
6.	Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran	80%	95%	0.76	20	15.2
	<b>Total target indeks</b>					<b>86.4</b>